



Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah

Andriani Dyah Arum

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Syrian conflict is an armed conflict between the Syrian Government and its opposition that emerged in March 2011. This conflict has caused enormous numbers of casualties and is still unresolved. This research aims to describe a brief history of Syrian Conflict, the complexity of US and Russia involvements in the conflict that tends to have confrontation pattern of offensive realism, and the implications of the confrontation. This research uses qualitative methods and uses secondary and primary data sources. The results of this research shows that the implications of confrontation between two superpowers (US and Russia) to Syrian Conflict resettlement process are; limiting the performance of the ISSG as a facilitator of negotiations, making the search for solutions and conflict resolution process by UN in Syria deadlocked which leads to the emergence of injustice against perpetrators of war crimes.

Keywords: *Syrian conflict, offensive realism, confrontation, war crimes, ISSG*

Pendahuluan

Kekerasan dan konflik yang terjadi di Suriah antara Pemerintah Suriah dan oposisinya sejak Maret 2011 telah memakan banyak korban dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik di Suriah ini telah mendapat perhatian dunia akibat krisis yang ditimbulkan terus berlangsung. Protes atau demonstrasi yang dilakukan rakyat Suriah mengawali perang saudara ini dan menumbuhkan semangat pemberontak untuk meruntuhkan Pemerintahan Bashar al-Assad hingga kini berakhir menjadi perang yang melibatkan banyak pihak termasuk aktor non-negara seperti kelompok teroris ISIS dan intervensi negara lain seperti Turki, Iran, Rusia dan AS (BBC, 2017). Konflik *intra-state* ini telah melanggar aturan-aturan berperang karena telah berjatuhnya korban dari kalangan sipil atau non-kombatan.

Rusia dengan jelas menyatakan dukungan kepada Pemerintah Suriah. Penawaran proposal penyelesaian konflik oleh Rusia adalah membuat pemerintah dan rakyat pemberontak bekerjasama tanpa harus menurunkan Bashar al-Assad dari kursi presiden (www.independent.co.uk, 2016). Intervensi Rusia dari segi militer pada 30 September 2015 dilakukan untuk menargetkan para pemberontak dan kelompok Jihadis. Dilansir dari The Guardian, pada Oktober 2015, Rusia melakukan serangan udara yang menargetkan komando dan pusat-pusat komunikasi, depot senjata dan pusat-pusat pelatihan yang digunakan oleh teroris, padahal saat itu seharusnya sedang berlangsung gencatan senjata dan CoH. Keputusan Presiden Putin terkait urusan Suriah terbilang agresif dan hal itu ditentang dan dikecam oleh musuh lama, AS.

Rusia dan AS menunjukkan ketidaksepahaman dalam urusan konflik Suriah. AS walau dalam skala yang tidak sebesar Rusia, melibatkan diri dengan mengintervensi

konflik namun dari sisi atau atas nama pemberontak di Suriah dan mendukung diturunkannya Bashar al-Assad dari kepresidenannya melalui pemilihan umum. Di beberapa perundingan pun AS dan Rusia sering terlihat tidak setuju satu sama lain. Kementerian Luar Negeri AS melalui juru bicaranya, John Kirby mengatakan bahwa AS menanggukahkan partisipasinya dalam hubungan bilateral dengan Rusia yang didirikan untuk mempertahankan penghentian permusuhan pada Oktober 2016 lalu karena gencatan senjata yang runtuh dengan cepat (Reuters, 2016). Terdapat kemiripan pada kepentingan AS dan Rusia untuk mengintervensi yakni dalam hal membendung terorisme. Namun, kesepakatan untuk mengkontra ISIS ataupun Jabhat al-Nusra, tidak dibarengi dengan kerjasama militer yang terpadu maupun pematuhan terhadap hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional.

Bagai terlibat dalam percaturan regional dan pengaruh di Suriah yang mempertaruhkan masa depan Suriah serta kecenderungannya dalam beraliansi, AS dan Rusia membuat kepentingan nasionalnya masing-masing saling beradu di panggung penyelesaian konflik Suriah. Perselisihan yang dialami AS dan Rusia adalah sebuah pertentangan atau bentuk kontradiktif dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang masing-masing negara ambil dalam menyikapi konflik Suriah.

Pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik sudah sampai tahap didirikannya International Syria Support Group atau ISSG yang bertujuan menemukan solusi diplomatis dan memfasilitasi negosiasi. ISSG mengadopsi prinsip yang sama dengan Geneva Communiqué tahun 2012 dan menghasilkan strategi politik transisi untuk Suriah ditengah penghentian permusuhan atau CoH (Cessation of Hostilities) (www.syriainstitute.org, 2016) dimana perwakilan AS dan Rusia menjadi menduduki posisi ketua bersama satu perwakilan PBB.

AS dan Rusia memiliki perbedaan pandangan yang signifikan terkait masa depan terbaik bagi Suriah. Pemberontak atau oposisi yang pro-demokrasi menuntut agar Bashar al-Assad segera mundur dari posisi presiden disebut oleh pemerintah Suriah sebagai “*foreign-backed terrorism*”. Pemerintah Suriah dengan didukung oleh Rusia telah menargetkan serangan-serangan ke kelompok-kelompok tersebut karena baginya keteriban atau *national security* lebih penting untuk dijaga daripada mengupayakan demokrasi untuk masyarakat Suriah. Sedangkan AS memiliki pandangan bahwa peningkatan kebebasan berpendapat dan pengimplementasian sistem demokrasi adalah solusi terbaik untuk Suriah, sehingga AS mendukung pergantian rezim Suriah. Bahkan AS pada masa kepresidenan Obama, untuk mewujudkan dukungan atas pergantian rezim atau pertentangannya terhadap rezim yang ia sebut tiran, mengirimkan bantuan militer untuk pejuang oposisi Bashar al-Assad berupa persenjataan dan pelatihan militer.

Ketidaksepahaman ini mempengaruhi keberlangsungan konflik dan menunjukkan bahwa keduanya enggan bekerjasama ke arah kesepakatan dalam penyelesaian konflik di Suriah. Negara-negara yang telah mendukung *proxy* dalam perang tidak memiliki integritas sebagai pasukan penjaga perdamaian (Philips, 2016).

Penelitian ini melihat pola interaksi antar *greatpowers*—AS dan Rusia, yang menunjukkan perselisihan dalam menanggapi konflik Suriah dan menggambarkan bagaimana implikasi dari perselisihan tersebut terhadap Konflik Suriah atau upaya penyelesaian konflik dalam kurun waktu 2013-2016.

Pembahasan

Kompleksitas Konflik Suriah

Pada Maret tahun 2011, Arab Spring sampai di Suriah, sebuah gelombang kerusuhan publik di seluruh Timur Tengah (Micallef, 2016) yang menuntut sebuah reformasi politik dengan cara masyarakat melakukan demonstrasi anti-pemerintah,

pemberontakan dan pemberontakan bersenjata. Pada tanggal 18 Maret 2011, tentara melepaskan tembakan ke pemrotes, menewaskan empat orang dan keesokan harinya, mereka menembak pelayat di pemakaman korban (BBC, 2017). Sejak Juli 2011, dikarenakan respons pemerintah yang keras terhadap masyarakat Suriah tersebut, membuat pemrotes menginginkan Presiden Bashar al-Assad untuk mundur dari posisi Presiden. Sampai pada tahun 2012, perseteruan tengah mencapai ibukota Damaskus dan kota kedua, Aleppo. *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) mencatat pada bulan April dan Juli tahun 2014 bahwa telah digunakan secara sistematis dan berulang, senjata kimia pada serangan mematikan yang menewaskan tidak hanya kombatan (BBC, Syria: The story of the conflict, 2016).

Selain pemain inti dalam Konflik Suriah, terdapat aktor asing yang juga turut terlibat secara signifikan dengan kebijakan intervensinya. Dengan pengintervensian ini, konflik Suriah menjadi konflik yang kompleks dan berevolusi dari sebuah perang saudara menjadi *extra-state conflict*. Aktor asing pertama adalah Rusia. Rusia menjadi pendukung setia Iran dan Bashar al-Assad yang sejauh ini menjadi pihak asing yang paling banyak melakukan intervensi bahkan dalam bentuk militer. Mempertahankan Bashar al-Assad di posisi sebagai Presiden Suriah adalah upaya Rusia mewujudkan pemenuhan kepentingan nasionalnya. Memiliki keterlibatan di Suriah merupakan sebuah agenda strategis bagi Rusia. Rusia telah bekerja sangat keras dalam beberapa tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah kekuatan global, terlihat dimana Rusia menunjukkan dan menjalankan kekuasaan dan pengaruh di Eropa untuk melawan hegemoni AS (Oliker, 2015). Rusia disini melihat sebuah peluang melalui keterlibatannya di Suriah untuk mendorong Rusia ke garis depan politik internasional (Stepanova, 2016). Kemudian ada AS dengan koalisinya seperti negara-negara Uni Eropa dan Arab Saudi yang memihak pada oposisi yang juga anti-Iran dimana juga menjadi salah satu motif AS karena anti-AS sudah bermunculan di Iran sejak revolusi Iran 1979. Kepentingan AS untuk mengintervensi adalah mempertahankan domonasinya di Timur Tengah, menyebarkan paham demokrasi yang serupa dengan AS, dan menjalankan kebijakan *Global War on Terror*-nya sebagai respons kemunculan ancaman kelompok teroris seperti ISIS. AS sebagai aktor yang paling kuat diantara aktor asing lainnya pada dasarnya memiliki satu tujuan paling utama yang selalu dalam agenda kebijakan luar negerinya, yakni meredam ancaman dan mematikan aktivitas kelompok teroris seperti ISIS.

Perselisihan AS dengan Rusia dimulai dari September 2013 ketika pertemuan negara-negara anggota G20 menghasilkan pecah suara atas masalah kemanusiaan di Suriah. Dilansir dari BBC 6/9/13, Putin mengatakan bahwa AS dan Rusia belum dapat mengatasi perbedaan soal Suriah. Di PBB, duta besar AS menuduh Rusia menahan 'sandra' dalam hal ini Dewan Keamanan untuk bergerak dengan menghalangi resolusi (BBC, G20 'divided' on Syria as Power criticises Russia, 2013). Perselisihan kemudian berlanjut ketika Rusia dengan intervensi militer yang diluncurkan pada tanggal 30 September 2015. Dalam konteks ini Rusia telah bertindak sendiri dan kemudian ditentang oleh AS dan koalisinya. Intervensi militer Rusia ke Suriah mendapat respon dari Sekretaris Negara AS, John F. Kerry, yang mengatakan bahwa Washington tidak akan menolak tindakan Rusia yang menargetkan negara-negara Islam atau faksi-faksi yang terkait dengan Al Qaeda tapi Washington akan memiliki "kekhawatiran serius," kata Kerry, jika serangan Rusia ditujukan pada kelompok oposisi lainnya (Patrick J. McDonnell, 2015). AS di bawah kepemimpinan Obama, sebelum mengakhiri jabatannya, juga meluncurkan serangan yang menargetkan pasukan militer Suriah pada September 2016 yang mendapat kecaman dari pihak Presiden Bashar al-Assad dan Rusia.

Mengenai ide akan perdamaian, atau dalam hal ini yang paling mungkin terjadi adalah proses menuju penyelesaian konflik, Mearsheimer (2013) mengatakan bahwa,

“Some realists maintain that the presence of an especially powerful state facilitates peace.” Beberapa realis mempertahankan ide bahwa kehadiran negara yang sangat kuat mampu memfasilitasi perdamaian. Sebagai negara dengan kapabilitas yang cukup bahkan lebih dari negara kebanyakan, AS dan Rusia dapat memainkan perannya menuju keadaan yang lebih baik untuk Suriah. Hal ini tercermin dari terbentuknya ISSG sebagai fasilitator perundingan yang diketuai oleh AS dan Rusia serta satu perwakilan PBB, intervensi AS dan Rusia pada Konflik Suriah atas dasar kepentingan nasional masing-masing karena kekuatan dan kapabilitas ekonomi maupun militer keduanya yang memadai, hingga struktur Dewan Keamanan PBB yang mana AS dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak istimewa ‘veto’ terhadap resolusi keamanan suatu wilayah berkonflik.

Implikasi Perselisihan AS dengan Rusia pada Konflik Suriah

Kerjasama dalam ISSG yang dipimpin oleh AS dan Rusia serta diawasi oleh PBB tidak lagi memainkan peran penting dalam proses penyelesaian konflik di Suriah. Pembentukan ISSG berujung pada kinerja yang tidak memuaskan dimana rencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kerjasama mengalami kemajuan yang lambat dari segi menurunkan ketegangan karena keterlibatan pihak asing yang menurunkan pasukan atau kekuatan militer tidak juga menarik diri. ISSG, sejak berdiri pada Oktober 2015, mengemban tanggungjawab sebagai fasilitator, pengkoordinir bantuan kemanusiaan, dan pembentuk gencatan senjata. Namun pada awal hingga pertengahan tahun 2016, korban masih berjatuhan bahkan terjadi serangan besar-besaran dan terindikasi pemakaian senjata kimia pada serangan di Aleppo.

Tugas ISSG pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu; *humanitarian task force* atau mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan *ceasefire task force* atau mengadakan gencatan senjata dalam konflik. Kedua tugas ini adalah tugas di samping memfasilitasi solusi diplomatik untuk penyelesaian konflik. PBB dan anggota ISSG sepakat untuk memfasilitasi transisi politik negara Suriah dimana masa depan Suriah adalah ditangan masyarakat Suriah, dan juga diharapkan tercapainya masa kebijakan gencatan senjata yang lebih abadi dan kokoh agar kondisi yang kondusif dapat mempermudah pengiriman bantuan kemanusiaan dan melakukan transisi politik. ISSG dan semua anggotanya memiliki pengaruh untuk mendukung melakukan kebijakan tersebut (PBB, Resolusi 2268, 2016). Dalam target enam bulan, Suriah seharusnya menetapkan tata kelola yang kredibel, inklusif dan non-sektarian dan menetapkan jadwal dan proses untuk penyusunan sebuah konstitusi baru. Selanjutnya, ISSG dan PBB mendukung adanya pemilihan yang bebas dan adil, sesuai dengan konstitusi baru, yang akan diadakan dalam waktu 18 bulan dan dikelola di bawah pengawasan PBB (PBB, Resolusi 2254, 2015). Saat resolusi ini keluar, anggapan akan masa depan yang terbaik untuk Suriah dan masyarakatnya secara keseluruhan adalah dengan transisi politik dan pemilihan pemimpin negara baru namun bahkan hingga akhir 2017, tidak tercapai pemilihan umum atau proses pergantian pemimpin yang diharapkan sebagian besar masyarakat Suriah.

Perundingan terkait pengiriman bantuan pun telah dibahas sebelumnya di bulan Februari 2016 namun upaya maksimal yang mampu dilakukan hanyalah menjatuhkan bantuan (*airdrops*) berupa makanan dan obat-obatan dari langit dengan helikopter untuk daerah-daerah terkepung. Upaya untuk memperlancar akses bantuan kemanusiaan masih tergolong gagal dan belum maksimal. Daerah-daerah terkepung paling merasakan kerugian apabila CoH tidak diterapkan secara optimal. Segala bentuk negosiasi menemui jalan buntu dimana perdebatan yang terjadi dalam badan ISSG ataupun PBB berlangsung tiada akhir dan Suriah menerima kekerasan dan serangan dari hari ke hari, dan bantuan kemanusiaan yang diharapkan dapat tersalurkan jika gencatan senjata mulai diterapkan,

harus berhadapan dengan blockade dari pihak rezim Assad untuk masuk ke beberapa wilayah tertentu.

Pemerintah Suriah yang berkoalisi dengan Rusia telah menjatuhkan serangan bom di Aleppo pada September 2016. Sebuah organisasi pemantau sipil Suriah, mendokumentasikan bahwa pengeboman tersebut menewaskan lebih dari 440 warga sipil, termasuk lebih dari 90 anak-anak (www.hrw.org, 2016). Jatuhnya serangan di Aleppo serta kegagalan gencatan senjata beberapa kali merupakan indikasi lemahnya komitmen anggota ISSG untuk mewujudkan hasil perundingan. TSI sebagai lembaga yang melaporkan secara periodik kemajuan perundingan dan situasi terkini di Suriah bahkan mengatakan bahwa ISSG tidak lagi memainkan peran penting dalam konflik Suriah karena beberapa bulan terakhir serangan dan serangan senjata kimia telah meningkat. ISSG telah kehilangan fokus dan kemampuan untuk membangun gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan nasional yang berkelanjutan. Tanpa dua langkah kunci ini, perundingan damai diplomatik telah terhenti. ISSG telah kehilangan daya tariknya sebagai kelompok yang menjadi utusan PBB atau gabungan negara-negara di dunia yang mendukung berakhirnya konflik di Suriah. Hal ini terjadi dikarenakan mulai memudarnya komitmen tiap anggota dan pimpinan ISSG, dan keberpihakan yang terang-terangan dilakukan beberapa negara seperti Rusia, Iran, AS hingga Arab Saudi untuk mendukung dan mengutamakan suara dan kepentingan salah satu pihak di konflik Suriah.

DK PBB dengan resolusinya 2118, mengikutsertakan Dewan Eksekutif Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW) untuk menetapkan prosedur khusus pada penghancuran segera program senjata kimia Republik Arab Suriah dan melakukan verifikasi yang ketat. Selain itu, DK PBB juga memiliki kapasitas untuk membuat rujukan ke Mahkamah Internasional atau ICC dalam rangka mengadili pihak yang melanggar hukum perang dalam konflik. Resolusi 2118 September 2013 beberapa kali telah dilanggar oleh Pemerintahan Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad. Bahkan setelah bergabung dengan konvensi senjata kimia ini, Pemerintah Suriah kembali menggunakan gas beracun untuk melawan pemberontak di desa Darya Damaskus. Pelanggaran-pelanggaran lainnya terekam dalam laporan di tahun 2014 yang menyebutkan terdapat 59 pelanggaran; di tahun 2015, terdapat pelanggaran 28 pelanggaran termasuk 15 pelanggaran terhadap resolusi 2209. Pada Agustus 2016, telah tercatat 139 serangan kimia di Suriah setelah Resolusi DK PBB 2118 ini disahkan (www.snh4hr.org, 2016).

Stephen O'Brien, seorang politisi Inggris dan diplomat yang merupakan Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, menyatakan wujud kekecawaannya terhadap DK PBB atas progresivitas yang nihil dari penyelesaian konflik di Suriah, mewakili juga posisi dan keprihatinan semua negara-negara Eropa Barat. Baginya, sudah cukup untuk dunia menyaksikan fakta yang menjelaskan beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak di konflik Suriah dimana dapat dianggap sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun kejahatan tetap terjadi, dan konflik terus berlangsung dimana kombatan tetap difasilitasi untuk berkonflik tidak peduli seberapa banyak korban yang berjatuhan (Jongberg, 2016).

Aleppo sebagai kota Suriah yang mengalami kerusakan terparah dibandingkan kota-kota lainnya. Sementara Damaskus atau ibukota, karena diduduki oleh pemerintah, sejauh ini kerusakan yang menimpanya tidak terlalu berarti. Aleppo dengan 4,5 ribu kilometer jalan, telah rusak sebesar 3,0 ribu kilomernya, begitu kerusakan total fasilitas kesehatan yang dialami yakni sebesar 35% rusak total dibanding rusak sebagian sebesar 28%. (www.worldbank.org, 2016). Pembunuhan terhadap korban dari kalangan sipil tidak juga berhenti atau berkurang untuk bulan-bulan dan tahun-tahun setelah perundingan tingkat internasional diadakan, menyoroti krisis kemanusiaan di Suriah. Pada Oktober 2016, masih tercatat korban jatuh dari kalangan sipil sebanyak 1106 jiwa dan mengalami

kenaikan pada bulan berikutnya, November 2017, sebanyak 1402 jiwa. Kebijakan Rusia untuk tetap mempercayakan keamanan Suriah di tangan rezim Assad tidak dibarengi dengan unsur kehati-hatian atau kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik ini. Untuk bulan-bulan selanjutnya di tahun 2017, korban dari kalangan warga sipil tetap berjatuh, 781 di bulan Januari, 876 di bulan Februari, dan 1134 di bulan Maret (www.sn4hr.org, 2013). Pesawat tempur Suriah terus menargetkan warga sipil meski ada resolusi Dewan Keamanan yang menetapkan gencatan senjata 30 hari di seluruh negeri. Rusia dan Suriah sekarang dengan berani mengabaikan keputusan Dewan Keamanan yang mengikat, selagi Rusia dapat menggunakan haknya untuk meveto resolusi yang menuntut penindaklanjutan cara menggunakan kekerasan selama konflik oleh Suriah dan sekutunya dimana bercirikan pelanggaran terhadap hukum humaniter.

Konflik ini terkesan bahwa pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan dalam rangka menundukan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang (Permanasari, 1999 dalam Rosyidin: 9). Rusia mengupayakan keberhasilan perang jatuh pada rezim Assad yang mana mampu mengurangi pengaruh AS ataupun Arab Saudi di Suriah. Pada Februari 2016, korban tewas konflik ini mencapai 470.000 orang. Menurut PBB, sekitar 6,3 juta orang pengungsi, dengan 5 juta pengungsi di negara tetangga (www.hrw.org, 2017). Selain itu, diantara korban tewas, telah tercatat sekitar 207.000 orang tergolong warga sipil telah tewas termasuk 24.000 anak-anak dan 23.000 wanita (www.sn4hr.org, 2017). Kejahatan perang terus terjadi dan menyebabkan banyak kerusakan yang tidak perlu. Serangan demi serangan tetap menimbulkan kerugian pada angka tertingginya bahkan setelah ISSG merumuskan sebuah penghentian permusuhan. Bantuan militer kepada pemerintah Suriah dari Rusia terus diluncurkan dari sejak intervensi pada 2015 yang mendapat izin dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Bantuan dari Rusia dipergunakan untuk melawan oposisi dan 'menertibkan' negara Suriah dari pemberontak yang mengancam rezim Assad dengan didukung oleh pihak asing yaitu koalisi AS.

Keamanan (security) bagi Rusia adalah pendekatan yang terbaik untuk mengurangi ancaman karena dengan menguatkan pemerintahan dan kemampuan militer, semua dapat terkendali dan masyarakat akan menjadi lebih tertib. Kebebasan (liberty) bagi AS adalah pendekatan yang sempat ditawarkan oleh AS untuk mengurangi aktivitas teror di Suriah atau negara berkonflik lainnya karena suara semua masyarakat dari berbagai golongan dapat tertampung. Keduanya sama-sama memiliki maksud untuk meredam gerakan ekstrimisme namun tidak keduanya memiliki tingkat perhatian dan keprihatinan yang sama terhadap pelanggaran HAM berat dan konflik kemanusiaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas Konflik Suriah yang di dalamnya terdapat intervensi aktif dua negara adidaya AS dan Rusia yang berpola perselisihan atau ketidaksepahaman, dan menggambarkan implikasi perselisihan AS dengan Rusia tersebut terhadap Konflik Suriah dan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan data-data yang telah ditemukan dari segi situasi konflik, keterlibatan AS dan Rusia, dapat disimpulkan bahwa perselisihan AS-Rusia berimplikasi pada penyesalain konflik di Suriah. Implikasi dari perselisihan adalah; menghambat kinerja ISSG dan Dewan Keamanan PBB dalam merespons konflik Suriah seperti mendukung dan mengawal transisi politik. Namun semenjak resolusi diresmikan, serangan masih berlanjut bahkan tetap menjatuhkan korban dari kalangan sipil sepanjang tahun 2016. Kenyataan adanya pertumpahan darah di Aleppo pada tahun 2016 bahkan adanya indikasi penggunaan bahan kimia dalam serangan, adalah

sebuah bukti bahwa ISSG kurang bertanggungjawab dalam mewujudkan situasi yang membaik di konflik Suriah ataupun mengatasi krisis kemanusiaan di Suriah.

Penyelesaian konflik Suriah menemui jalan buntu dalam prosesnya yang digerakkan dari perundingan DK PBB. Dalam hal perundingan penyelesaian konflik Suriah membutuhkan semua aktor untuk terlibat aktif dan terbuka. PBB melalui Dewan Keamanannya telah memutuskan untuk mendukung secara penuh ISSG dan keputusannya dari Desember 2015 dengan Resolusi 2254. Namun, anggota tetap dengan hak veto dapat melakukan kontrol lebih terhadap resolusi-resolusi lain yang datang menyempurnakan sikap DK PBB atas jalan keluar terbaik untuk konflik Suriah. Kebuntuan dalam perundingan DK PBB pun memunculkan ketidakadilan terhadap pelaku kejahatan perang. Dalam hal putusan kejahatan perang, sebanyak empat kali terhitung veto oleh Rusia berhasil memblokir sebuah tawaran untuk merujuk situasi pelanggaran hukum perang di Suriah ke ICC.

Referensi

- Arlina Permanasari, et.al., "Pengantar Hukum Humaniter Internasional" dalam Mohamad Rosyidin, *Kejahatan Perang: Perspektif Politik dan Hubungan Internasional* (Semarang: CV EF Press Digimedia, 2017), hlm. 9
- BBC. (2016, 03 11). *Syria: The story of the conflict*. Retrieved from BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>
- BBC. (2017, 04 07). *What's happening in Syria?* Retrieved from BBC News: <http://www.bbc.co.uk/newsround/16979186>
- Jongberg, K. (2016). BRIEFING Syria: stalled peace process and blocked humanitarian access. EU Policy Department: Directorate-General for External Policies.
- Mearsheimer, J. J. (2013). Chapter 4: Structural Realism. In M. K. Tim Dunne, *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (p. 72). London, UK: Oxford University Press.
- Oliker, O. (2015, 10 29). *Russia in Syria*. Retrieved from Center for Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/russia-syria>
- Patrick J. McDonnell, W. H. (2015, September 30). *Russia launches airstrikes in Syria amid U.S. concern about targets*. Retrieved from Los Angeles Times: <http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-kremlin-oks-troops-20150930-story.html>
- Philips, D. L. (2016). *How Syria's Civil War Ends*. Retrieved from Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/how-syrias-civil-war-ends_b_12153750.html
- Stepanova, E. (2016). Russia's Policy on Syria after the Start of Military Engagement. *PONARS Eurasia*.
- www.hrw.org. (2016, 12 01). *Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing Aleppo*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/12/01/russia/syria-war-crimes-month-bombing-aleppo>
- www.sn4hr.org. (2013, July 7). *Using chemical weapons by Syrian government's 25 times in 5 provinces*. Retrieved from Syrian Network for Human Rights: <http://sn4hr.org/blog/2013/07/07/using-chemical-weapons-by-syrian-governments-25-times-in-5-provinces/>
- www.sn4hr.org. (2017, 03 18). *Victims' Death Toll*. Retrieved from Syrian Network for Human Rights: <http://sn4hr.org/blog/2017/03/18/35726/>
- www.syriainstitute.org. (2016). *International Syria Support Group (ISSG)*. The Syria Institute.

www.worldbank.org. (2015, December 16). *Impact of the Syrian Crisis*. Retrieved from The World Bank: <http://www.worldbank.org/en/programs/impact-of-the-syrian-crisis#2>

www.worldbank.org. (2017, 04 01). *The World Bank In Syrian Arab Republic*. Retrieved from The World Bank: <http://www.worldbank.org/en/country/syria/overview>